

Prakata	vii
Bagian 1 Pendahuluan	1
Bagian 2 Kebijakan Kriminal sebagai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	5
Bagian 3 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Mengguna- kan Sarana Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	9
Bagian 4 Tahap-Tahap Fungsionalisasi Kebijakan Hukum Pidana	15
A. Tahap Formulasi	15
B. Tahap Aplikasi.....	22
C. Tahap Eksekusi	22
D. Tahap Evaluasi	22
Bagian 5 Pengertian Korporasi dalam Ilmu Hukum Pidana dan Permasalahan Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggung- jawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang- undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia	24
A. Pengertian Korporasi dalam Ilmu Hukum Pidana.	24
B. Permasalahan Kebijakan Formulasi Mengenai Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia.....	27

Bagian 6	Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia	31
	A. Periode Tahun 1950–1980-an	32
	B. Periode Tahun 1990–2000	99
	C. Periode Tahun 2000–2017	246
Bagian 7	Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (dan Segala Sesuatu yang Berkaitan dengannya) dalam RKUHP Tahun 2015	541
	A. Kebijakan Formulasi Mengenai Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	542
	B. Kebijakan Formulasi Mengenai Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>).....	542
	C. Kebijakan Formulasi Mengenai Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	543
	D. Kebijakan Formulasi Mengenai Sanksi Pidana Bagi Korporasi	545
Bagian 8	Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan PERMA RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi	549
Daftar Pustaka		587
Profil Penulis		597